



SALINAN

LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022 KALURAHAN WIROKERTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : Bahwa dalam perjalanan penyaluran BLT DD tahun anggaran 2022 terdapat perkembangan kondisi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2022 dan perlunya pergantian *by name* calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Peraturan Lurah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Kalurahan Wirokerten dengan Peraturan Lurah Wirokerten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor

- 84);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 89);
  26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
  27. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
  28. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
  29. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 5);
  30. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 7);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan tentang Pergantian Nama Penerima Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (Blt Dd) Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Wirokerten pada tanggal 11 Februari 2022.

## **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022 KALURAHAN WIROKERTEN.

### Pasal 1

Pasal (7) Peraturan Lurah Wirokerten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peraturan Lurah Wirokerten Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Tahun 2022 Kalurahan Wirokerten. Dalam Pasal 7 ditambah tiga pasal lainnya yakni Pasal (7a), Pasal (7b) dan Pasal (7c).

### Pasal 7a

Membatalkan sebanyak 9 (sembilan) nama Dari Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT ) Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1 Peraturan Lurah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peraturan Lurah Wirokerten Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Tahun 2022 Kalurahan Wirokerten. Adapun *by name* tersebut tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Lurah Wirokerten dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

### Pasal 7b

Mengganti sebanyak 9 (sembilan) nama yang telah dibatalkan sebagai mana tersebut pada pasal (7a) ke dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Wirokerten. Nama tersebut tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Lurah Wirokerten dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

### Pasal 7c

Daftar Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT setelah diadakan perubahan tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Lurah Desa dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

## Pasal 2

Peraturan Lurah Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Wirokerten.

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada Tanggal : 14 Februari 2022

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten

pada tanggal 14 Februari 2022

CARIK WIROKERTEN

ttd

RINI WIDIASTUTI

## BERITA KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 2



Lampiran 1 Peraturan Lurah Wirokerten Nomor 2 Tahun 2022

DAFTAR PENGGANTI KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022  
KALURAHAN WIROKERTEN

No	Nama di Perlurdes	Alamat	Nama Pengganti	NIK pengganti	Alamat	Alasan Penggantian
1.	Imronah	Glondong Rt 05	Warto Utomo	3402123012430003	Glondong Rt 03	Dobel Bansos
2.	Mardi Sumarto	Grojogan RT 1	Sabarjo	3402123112570066	Grojogan RT 9	Dobel Bansos
3.	Arif Widiyanto	Botokenceng RT 7	Rohadi	3402123112590048	Botokenceng RT 4	Dobel Bansos
4.	Sukinah	Kepuh Wetan RT 2	Ngatiyem	3402125611570002	Kepuh Wetan RT 5	Dobel Bansos
5.	Maryani	Kepuh Wetan RT 2	Karso Setomo/ Retiyem	3402125809500001	Kepuh Wetan RT 1	Dobel Bansos
6.	Sugeng Widodo	Kepuh Wetan RT 1	Wiyanto	3402121605810004	Kepuh Wetan RT 2	Dobel Bansos
7.	Darto Sutrisno	Mutih RT 3	Wawan Widiawan	3402122704940005	Mutih RT 5	Dobel Bansos
8.	Trimo Raharjo	Sampangan RT 4	Sulistyana	3402121003830004	Sampangan RT 6	Dobel Bansos
9.	Cipto Sumarto, Ny	Grojogan RT 6	Daimatun	3402125108590004	Grojogan RT 6	Menolak



LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM